



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Basilio Dias Araujo
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI
3. NHK : 465810

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2067 m <sup>2</sup> /25 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI		Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2067 m <sup>2</sup> /16.5 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI		Rp. 750.000.000
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	150.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	708.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.358.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	460.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.898.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.